

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM yang dilaksanakan pemerintah provinsi DKI Jakarta pada masa Covid-19 merupakan sebuah *re-branding* program yang sudah terlaksana jauh sebelum Covid berlangsung dengan nama OK-OCE. Program OK-OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) adalah upaya yang dilaksanakan purnawirawan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat DKI dan masih berlangsung sampai saat ini dengan nama *JakPreneur*, program ini sudah beberapa kali mengalami *re-branding* mulai dari OKE-OCE, PKT (Pengembangan Wirausahawan Terpadu) atau KSBB UMKM, hingga *JakPreneur* dikarenakan tujuan yang menjadi tuntutan target program tersebut berubah seiring waktu berjalan.

Saat program ini masih menggunakan nama OKE-OCE memiliki target untuk menjaring masyarakat sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapat pelatihan wirausaha untuk meningkatkan taraf ekonomi, kemudian disaat Covid-19 sedang merebak terkhusus di DKI Jakarta terjadi *re-branding* pertama yaitu PKT atau KSBB UMKM dengan tujuan memulihkan perekonomian masyarakat lewat produk wirausaha yang dibuat, kemudian setelah pandemi Covid-19 berangsur selesai terjadi *re-branding* kedua dengan nama *JakPreneur* yang kemudian digunakan hingga sekarang dengan tujuan akhir menciptakan wirausahawan yang berdaya

(mandiri, kreatif, inovatif) sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta dan mengurangi pengangguran.

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, implementasi program KSBB UMKM melalui ekosistem Jakpreneur belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan ideal yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020. Meskipun secara kuantitatif terjadi lonjakan angka partisipasi (*onboarding*) UMKM ke dalam sistem, penelitian ini menemukan indikasi kuat bahwa program tersebut cenderung terjebak pada seremoni administratif dan politis semata. Hal ini terlihat dari fakta bahwa intervensi pemerintah lebih berfokus pada pencapaian target "angka pendaftar" untuk kebutuhan laporan kinerja, namun lemah dalam memastikan keberlanjutan (*sustainability*) usaha pasca-bantuan. KSBB hadir seolah sebagai "bemper" ekonomi sesaat untuk meredam gejolak sosial, namun gagal menyentuh akar permasalahan struktural UMKM seperti ketimpangan akses pasar dan literasi digital yang mendalam. Dengan kata lain, negara hadir memberikan "ikan" (bantuan fisik/modal) dan "kail" (pelatihan), namun lupa bahwa "kolamnya" (daya beli pasar) sedang kering, sehingga efektivitas program ini lebih bersifat simbolis daripada solutif dalam jangka panjang.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Keberhasilan dan kendala dalam implementasi program KSBB UMKM dipengaruhi oleh empat dimensi utama:

A. Faktor Pendukung: Terletak pada Disposisi dan Struktur Birokrasi. Para pelaksana di tingkat Dinas hingga Kasatpel Kecamatan menunjukkan komitmen dan sikap suportif yang tinggi dalam memfasilitasi legalitas usaha (IUMK/NIB) dan memediasi kolaborator. Selain itu, struktur birokrasi memiliki pembagian kerja yang jelas dan tertata rapi, sehingga alur komando dari tingkat provinsi ke kecamatan berjalan secara prosedural.

B. Faktor Penghambat: Terletak pada Komunikasi dan Sumber Daya. Komunikasi menjadi hambatan terbesar karena terjadinya distorsi informasi dari tingkat atas ke bawah, serta ketidakkonsistenan informasi antar instansi terkait nominal bantuan modal (simpang siur antara Rp1,2 juta hingga Rp10 juta). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (pendamping) yang tidak sebanding dengan jumlah UMKM, serta kendala teknis seperti gagap teknologi (gaptek) dan buruknya riwayat kredit (SLIK OJK) UMKM, menyebabkan bantuan modal dan pelatihan daring tidak terserap secara optimal.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas PPKUKM untuk perbaikan program berkelanjutan ini di masa mendatang:

1. Penguatan Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Pemerintah perlu memperbaiki saluran komunikasi agar tidak hanya mengandalkan platform

digital atau grup WhatsApp semata. Disarankan untuk melibatkan tokoh masyarakat lokal (RT/RW) dalam sosialisasi door-to-door bagi pelaku UMKM yang masuk kategori gaptek (gagap teknologi) agar informasi program dapat diterima secara merata dan utuh, meminimalisir distorsi informasi. Konsistensi informasi terkait nominal dan syarat bantuan juga harus dijaga satu pintu agar tidak membingungkan masyarakat.

2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pendamping (SDM) Dinas PPKUKM perlu meninjau kembali rasio jumlah pendamping (PJLP) dengan jumlah UMKM binaan. Penambahan jumlah personil atau peningkatan kompetensi pendamping melalui pelatihan khusus sangat diperlukan agar proses pembinaan bisa dilakukan lebih intensif, bukan sekadar pendataan administratif.
3. Fleksibilitas Persyaratan Akses Modal Mengingat situasi darurat seperti pandemi membuat banyak UMKM mengalami kesulitan keuangan, disarankan agar pemerintah dan mitra perbankan (Bank DKI) merumuskan skema "kredit khusus darurat" dengan relaksasi persyaratan BI Checking/SLIK OJK. Hal ini penting agar bantuan modal benar-benar bisa menjangkau UMKM yang paling terdampak yang justru seringkali memiliki riwayat kredit kurang lancar akibat krisis.
4. Fasilitasi Infrastruktur Digital Untuk mendukung pelatihan daring atau pemasaran digital, pemerintah disarankan tidak hanya memberikan materi pelatihan, tetapi juga memikirkan subsidi kuota internet atau penyediaan "pojok digital" di kantor kecamatan/kelurahan. Hal ini bertujuan membantu

UMKM yang memiliki keterbatasan perangkat dan akses internet agar tetap bisa mengikuti program pemberdayaan.